

Reposisi Peran Negara Untuk Melindungi Kelas Petani Perempuan Indonesia dalam Menghadapi Neoliberalisme di Bidang Pertanian

Oleh: Skolastika Meitrisya Aprodite

Neoliberalisme merupakan ideology politik yang berkembang atas dasar liberalisme klasik yang bermetamorfosis dan berkembang melalui pemikiran para akademisi Mazhab Chicago seperti Milton Friedman dan Freiderich Hayek. Neoliberalisme dikukuhkan melalui Washington Consensus yang berisi 10 poin dengan corak pro pasar bebas. Setelah konsensus tersebut muncul, deregulasi dan privatisasi di berbagai negara mulai digalakkan melalui *Structural Adjustman Procedure*.

Salah satu implikasi nyata neoliberalisme adalah diberlakukannya globalisasi yang ditandai dengan meluasnya arus barang dan jasa antar negara. Kerja sama ekonomi baik bilateral maupun multilateral antar kawasan mulai digiatkan dengan adanya perjanjian-perjanjian internasional seperti G-20 dan ASEAN Economic Community (AEC). Para neolib mempercayai bahwa globalisasi merupakan keniscayaan karena perkembangan teknologi dan sains yang mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Berbeda dengan para neolib, James Petras dan Henry Veltmeyer (2004) memandang bahwa globalisasi merupakan sebuah proyek kelas para neolib untuk menimbun modal bagi kepentingan mereka. Motif imperialisme di balik globalisasi terlihat melalui sarana-sarana yang mereka gunakan seperti lembaga keuangan internasional seperti IMF, WTO dan World Bank yang saat ini memiliki peran besar dalam mengintervensi kebijakan di berbagai negara. Selain itu banyak bermunculan juga korporasi-korporasi multinasional melakukan ekspansi pasar sehingga mampu dengan leluasa melakukan eksploitasi melalui cara *kongkalikong* kebijakan dengan pemerintah karena memiliki modal besar.

Neoliberalisme juga membawa konsekuensi lain yaitu terbatasnya fungsi negara sebagai pemberi perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu; penyedia pelayanan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan, dan pengelola konflik dalam

masyarakat¹. Negara, dalam istilah Immanuel Kant, dianggap hanya sebagai ‘penjaga malam’ yang memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan baik. Negara dalam teori klasik dilihat sebagai *polis* yang merupakan alat untuk mengorganisasikan kepentingan bersama. Namun George Soros memandang bahwa kepentingan bersama dapat terpenuhi ketika setiap orang dibiarkan bersaing dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Relasi negara, *civil society* (yang menjadi representasi masyarakat) dan swasta yang seharusnya seimbang antar entitasnya justru saling menguasai. Secara teoritis kontrak sosial, negara sebagai persekutuan individu yang dipilih oleh masyarakat sebagai representasi untuk mengatur kehidupan bersama bertanggung jawab terhadap masyarakat yang memilih mereka. Negara memiliki otoritas terhadap masyarakat. Dalam pengelolaan negara, ada entitas swasta yang membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dikerjakan oleh negara. Jika ketiga entitas tersebut menjalankan peran secara tertib, maka kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Namun nyatanya peran pemerintah yang dilegitimasi oleh kepentingan masyarakat justru banyak berpihak pada kepentingan swasta yang cenderung eksplotatif pada masyarakat.

Proyek kepentingan kelas dalam wujud neoliberalisme membawa dampak cukup signifikan terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah. Masyarakat kelas menengah ke bawah semakin rentan terhadap kemiskinan karena melalui proses deregulasi dan privatisasi, negara semakin kehilangan tanggung jawab sosial kepada konstituen yang memberi legitimasi atas otoritas negara dalam mengatur masyarakat. Salah satu kelas menengah ke bawah yang terpengaruh dampak negative adalah petani perempuan.

Petani perempuan di Indonesia menurut data sensus pertanian tahun 2013 memiliki jumlah sebesar 7.343.180 atau sekitar 23,16% dari total petani Indonesia². Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah petani perempuan di Indonesia hampir mencapai sepermpat penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai petani. Dalam perannya di bidang pertanian, petani perempuan memiliki andil yang cukup besar dalam pengelolaan dan budidaya. Ada sebuah

¹ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan, PT. Gramedia Widiasana Indonesia, Jakarta, hal.1.

² <http://st2013.bps.go.id/dev/st2013/index.php/site/tabel?tid=23&wid=0>, Jumlah Petani menurut Sektor/Subsektor dan Jenis Kelamin tahun 2015. Data BPS

ikatan erat antara perempuan dengan pertanian keluarga sehingga menempatkannya sebagai pengelola benih hingga pengelola panen untuk konsumsi keluarga.

Dengan maraknya kebijakan pemerintah bernuansa neoliberalisme, hasil pertanian di Indonesia saat ini semakin tidak memberikan kesejahteraan kepada petani. Industrialisasi menyebabkan banyaknya lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi pemukiman penduduk, bangunan public, perkantoran, dan taman hiburan. Ada sekitar 40-250 m³ atau 35-220 ton tanah/Ha lahan tererosi setiap tahun dengan laju peningkatan 7-14% atau 3-28 ton tanah/Ha/tahun. Departemen Kehutanan mengidentifikasi luas lahan kritis mencapai 13,2 juta Ha. Penyebab utamanya adalah erosi longsor dan laju erosi tanah pada lahan pertanian di Indonesia yang berlereng 3-15% tergolong tinggi, yaitu berkisar 97,5-423,6 ton/Ha/tahun³. Selain itu juga degradasi lahan pertanian akibat salah dalam pengelolaan pertanian juga membuat produktivitas tanah dalam menghasilkan hasil pertanian semakin menurun. Menurunnya jumlah lahan pertanian menyebabkan keluarga petani harus mencari tambahan pekerjaan. Oleh karena itu saat ini isu tentang feminisasi pertanian semakin menguat karena semakin banyak jumlah petani perempuan yang menjadi tulang punggung pertanian Indonesia.

Permasalahan semakin mengkerucut karena banyak petani perempuan adalah petani gurem yang tidak memiliki modal dan hanya bekerja sebagai petani upahan. Dengan paradigma bahwa pertanian merupakan pekerjaan laki-laki, para petani perempuan dibayar lebih rendah karena seorang petani perempuan bukanlah profesi tetapi suatu kewajiban untuk membantu suami bekerja dan mengurus sawah sehingga hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah publik.

Dengan terbatasnya alat modal untuk menunjang pekerjaannya, maka peran petani perempuan semakin tidak eksis dan menjadi termarjinalkan oleh struktur yang muncul. Selain itu banyak kebijakan pemerintah yang lebih pro pasar daripada masyarakat, seperti misalnya harga pembelian pemerintah terhadap beras petani yang rendah, impor bahan pangan, penggunaan pupuk kimia untuk memperbanyak hasil produksi tetapi membahayakan kesehatan perempuan, serta modernisasi pertanian yang kerap tidak mampu diadopsi oleh petani perempuan karena keterbatasan aksesibilitas dan kapabilitas mereka.

³ Dlunduh dari 30 Juli. "Degradasi Lahan dan Penyebabnya." 2015 <http://litbang.patikab.go.id/index.php/jurnal/>

Artikel ini ingin mengulas tentang feminisasi pertanian yang sedang berkembang di Indonesia dalam kerangka pikir neoliberalisme. Pandangan feminisme sosialis menjadi dasar dalam mengembangkan fenomena yang terjadi dan dikaitkan dengan bagaimana seharusnya relasi peran negara yang semakin dicitkan oleh neoliberalisme, swasta yang semakin berkuasa dan *civil society* yang saat ini menjadi harapan untuk menjembatani negara, swasta dan petani perempuan.

FEMINISASI PERTANIAN

Feminisasi pertanian menurut Lastaria-Conhiel, adalah fenomena dimana perempuan mengambil kendali tanggung jawab kegiatan pertanian akibat terbukanya kesempatan kerja bagi tenaga kerja laki-laki yang lebih luas di sektor non pertanian (misal bidang jasa dan industri) yang hasilnya lebih menguntungkan daripada di sektor pertanian. Feminisasi pertanian sebenarnya bukan sebuah fenomena baru karena pada hakikatnya perempuan identik dengan pertanian.

Keterkaitan perempuan terhadap pertanian sangat dekat. Menurut Dwi⁴, ada 4 alasan mengapa perempuan begitu erat dengan pertanian, yaitu a) secara fisiologis perempuan terlibat dalam waktu yang lebih lama dengan spesies kehidupan dimana perempuanlah yang merawat masa depan manusia, b) posisi perempuan di wilayah domestic merupakan tempat bayi-bayi ditransformasikan menjadi makhluk cultural, c) psikologi perempuan sebagai ibu membuahakan cara berpikir yang lebih relasional, konkret dibanding laki-laki, d) wilayah domestic perempuan membuat mereka berpikir secara jangka panjang tentang kehidupan bagi rumah tangga mereka.

Peran perempuan sebagai petani telah ada dalam sejarah kehidupan manusia berabad tahun lalu. Pembagian kerja yang terjadi di masa perburuan saat itu adalah perempuan dipercaya mengolah tanah untuk menghasilkan makanan, sedangkan laki-laki berburu. Dengan pembagian kerja tersebut, perempuan memiliki status sosial lebih tinggi di kalangan masyarakat karena dianggap menjadi tulang punggung keluarga. Posisi perempuan menjadi strategis karena terpendang bagi keluarga sehingga struktur sosial yang berkembang saat itu adalah matriarkat. Kemudian laki-laki yang berburu melihat pekerjaan perempuan, merasa bahwa pertanian lebih

⁴ Dwi dalam Billy K Sarwono, *Pemaknaan Isu Pemanasan Global dan Lingkungan di Media oleh Kaum Perempuan Urban*, Jurnal Ilmu Komunikasi vol 8 no 2 Mei 2010, hlm 179.

menguntungkan dan aman dari serangan binatang buas sehingga berhenti berburu lalu mulai pekerjaan mengolah tanah dikerjakan oleh laki-laki⁵.

Zaman kembali berputar dengan penemuan-penemuan teknologi hingga mampu menciptakan teknologi yang mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup. Teknologi membawa dampak yang sangat signifikan bagi manusia sebagai makhluk ekonomi sehingga struktur sosial bergeser menjadi patriarkhat. Bergesernya nilai dari matriarkhat ke patriarkhat sejalan dengan berkembangnya ideology politik liberalism klasik yang kemudian berubah hingga menjadi neoliberalisme. Tanah yang dulunya dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, kemudian mulai dieksploitasi untuk menghasilkan lebih banyak dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan. Hasil-hasil pertanian dipaksa untuk menghasilkan lebih banyak tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia tetapi juga keinginan manusia untuk menguasai alam.

Sejak zaman kerajaan di Nusantara, keterlibatan perempuan dalam aktivitas pertanian memiliki kontribusi besar terutama pada sub system produksi dimana kegiatan produksi pertanian yang dilakukan oleh perempuan sangat dipengaruhi oleh tipe agroekosistem dan status sosial ekonomi rumah tangga⁶. Perempuan banyak mengambil peran sentral selama proses produksi pertanian hingga menjadi komoditas yang siap dipasarkan. Oleh karena itu perempuan seharusnya diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mendapat akses dan control terhadap usaha pengolahan pertanian.

Namun ketika masa orde baru, ide tentang revolusi hijau muncul. Ide ini merupakan pengejawantahan pandangan developmentalisme yang menjadi dasar perekonomian pemerintahan Soeharto. Revolusi hijau merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan hasil produksi pertanian menggunakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Pada masa ini Indonesia mampu menjadi macan Asia karena keberhasilannya dalam swasembada pangan. Tetapi dibalik itu, petani perempuan menjadi kaum yang termajinalisasi karena dampak revolusi hijau mengubah struktur sosial masyarakat. Revolusi hijau membuat peran kerja perempuan yang dulunya dipercaya untuk memilih benih, menyiangi, menanam, memupuk, memanen hingga

⁵ Lih Soekarno, "Sarinah : Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia".

⁶ Dian Maharso Yuwono, *Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Pertanian : Kasus pada Pelaksanaan FEATI di Kabupaten magelang*. Jurnal SEPA vol 10 no 1 September 2013, hlm 141.

menumbuk padi tergantikan oleh peran teknologi⁷. Setelah revolusi hijau berakhir, petani perempuan saat ini menjadi asing dengan pekerjaan pertanian terutama karena sulit beradaptasi dengan modernisasi di bidang pertanian.

Muncul gejala dehumanisasi pada petani perempuan karena mereka dimandulkan dalam peran mereka menghidupi pertanian. Petani laki-laki diberi insentif terus menerus oleh pemerintah agar lahan pertanian mereka memiliki produktivitas tinggi namun semakin menyusut kandungan tanahnya. Perempuan tidak mampu mengambil andil karena represi kuat dari pemerintah untuk mendomestifikasi perempuan juga karena hasil pertanian yang begitu melimpah membuat petani tidak berpikir jangka panjang tentang keberlangsungan lahan pertanian.

Upaya mereposisi peran perempuan di masa reformasi hingga pasca reformasi terlihat dari upaya pembuatan regulasi yang lebih responsive gender. Hal ini pernah coba dirumuskan di era Gus Dur oleh Bappenas yang bekerja sama dengan *Women Support Project* yang menghasilkan modul “Analisis Gender Dalam Pembangunan Pertanian”⁸. Rencana aksi dari modul tersebut terimplementasi di unit rumah tangga pertanian dan pelaku bisnis pertanian, kelembagaan sosial ekonomi pertanian, dan aparat pertanian. Dalam modul tersebut terlihat bahwa kebijakan pemerintah sensitif gender dengan melibatkan perempuan di banyak sektor baik dalam pengolahan pertanian, penyuluhan tentang teknologi dan pengetahuan terbaru tentang pertanian, serta minimalisasi kesenjangan gender dalam pertanian.

KESADARAN KELAS PETANI PEREMPUAN

Neoliberalisme memiliki semangat positif bagi perempuan yang tertuang dalam 8 poin Millenium Development Goal's (MDG's) yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan kesehatan ibu. Di era reformasi, gerakan perempuan menjamur dengan banyaknya komunitas dan lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan hak-hak perempuan baik di tingkat regional maupun nasional.

⁷ Dian Maharso, *ibid.* hlm 142.

⁸ Nina Sardjunani, dkk. *Analisis Gender dalam Pembangunan Pertanian*. Bappenas dan *Women Support Project II*. 2011.

Kesejahteraan petani perempuan menjadi salah satu isu yang banyak diperjuangkan oleh lembaga swadaya masyarakat dan komunitas yang bergerak di bidang pemberdayaan, advokasi dan pendidikan bagi perempuan. Contohnya adalah Yayasan Jurnal Perempuan, Solidaritas Perempuan dan kelompok PKK Vigur Organik. Gerakan-gerakan perempuan baik melalui LSM maupun komunitas sangat penting untuk melindungi petani perempuan yang rentan terhadap kebijakan pemerintah yang banyak merugikan masyarakat karena petani perempuan masih menjadi kelompok yang rentan karena kurangnya kapabilitas, daya saing yang rendah serta akses yang tidak memadai untuk memproduksi hingga memasarkan hasil pertanian mereka.

Munculnya berbagai gerakan tersebut merupakan salah satu implikasi penting bahwa solidaritas terhadap perempuan semakin tinggi dalam menghadapi permasalahan petani perempuan. Solidaritas perempuan menjadi titik balik bagi perjuangan bagi keadilan gender di bidang pertanian yang masih sarat dengan paradigm patriarkhi yang bias dan buta gender. Melalui komunitas, kelompok dan LSM yang peduli terhadap kepentingan petani perempuan, transformasi pengetahuan dan peningkatan aksesibilitas terhadap sumberdaya teknologi dapat lebih cepat sehingga petani perempuan mampu secara mandiri melakukan pengolahan lahan pertanian secara lebih baik dan berdaya saing tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga namun dapat berdampak dalam pemenuhan pangan dalam skala yang besar.

Solidaritas muncul melalui kesadaran kelas yang menjadi inti dari perjuangan Marxis yang menginspirasi pergerakan feminisme sosialis. Kesadaran kelas bagi Marx dianggap mampu menjadi lokomotif bagi pergerakan untuk melakukan perubahan baik secara evolutif maupun revolutif. Kesadaran kelas membuat perempuan semakin sadar bahwa selama ini mereka tidak diberi ruang yang sama dengan laki-laki untuk mendapat akses dan control terhadap sumber daya pertanian. Dengan paradigm patriarkhi, sosialisasi tentang peningkatan hasil pertanian dan penyuluhan yang terkait dengan pengolahan pertanian hingga pemasaran dari pemerintah masih terbatas diberikan kepada laki-laki.

Kesadaran kelas dalam feminisme sosialis merupakan sintesa pemikiran antara feminis marxis dan feminisme radikal yang muncul sejak tahun 1970an dimana pemikiran ini menjelaskan ketertindasan perempuan diakibatkan oleh system kelas (akibat system kapitalisme dan perbedaan gender). Feminisme sosialis merujuk pada hubungan antar kelas dan gender dalam reproduksi kapitalisme. Penjelasan-penjelasan feminisme sosialis atas penindasan menyajikan

dominasi sebagai susunan structural berskala besar, suatu relasi kekuasaan di antara katagori-katagori para actor sosial yang direproduksi oleh pemahaman system patriarchal yang mendominasi.

Feminisme sosialis menyatakan bahwa masyarakat mengalami pergeseran berangsur-angsur dari patriarkhi privat dimana seorang individu laki-laki mendapatkan keuntungan dari subordinasi atas perempuan dalam rumah tangga menuju patriarkhi public dimana perempuan punya akses dalam lapangan kerja berupah, lembaga-lembaga negara dan budaya namun pada kenyataannya perempuan ter subordinasi.

Patriarkhi privat muncul dalam rumah tangga petani ketika perempuan didomestifikasi terhadap kebutuhan yang sifatnya rumah tangga seperti mengurus rumah dan anak-anak tanpa ada aturan hukum yang menghargai pekerjaan ibu rumah tangga karena menjadi urusan privat keluarga. Dengan pembagian gender tersebut, petani perempuan sebenarnya semakin dekat dengan kegiatan pertanian karena kebutuhan pangan menjadi suatu pemenuhan kehidupan primer yang domestik bagi rumah tangga petani.

Namun munculnya feminisasi pertanian mengubah struktur patriarkhi privat menjadi patriarkhi publik. Muncul kontradiktif perjuangan gender ketika feminisme mendorong keterlibatan lebih perempuan di ruang-ruang publik namun stereotip budaya masyarakat masih bersifat patriarkhi. Paradigma masyarakat tentang feminisasi pertanian menempatkan perempuan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga yang cenderung subsisten, bukan untuk memenuhi kebutuhan pangan orang banyak sehingga kontrol dan akses untuk mengembangkan sumber daya pertanian terbatas.

Dengan paradigma patriarkhi public yang tidak menguntungkan posisi perempuan tersebut, maka pekerjaan rumah komunitas perempuan, LSM, dan lembaga yang aktif dalam memberikan pemberdayaan kepada petani perempuan sangat berat. Menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya peningkatan sumber daya manusia yang mau bertahan menjadi seorang petani merupakan tantangan zaman ini di tengah *mindset* masyarakat yang memiliki paradigma bahwa pekerjaan di lahan pertanian tidak menjanjikan. Regenerasi di bidang pertanian tidak berjalan dengan baik karena melihat kehidupan petani tidak sejahtera. Hal ini terlihat pula dari data BPS tahun 2013 yang merilis hasil sensus pertanian yang hasilnya adalah kecenderungan

menurunnya jumlah rumah tangga petani dari 31,7 juta rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 26,13 juta pada tahun 2013 (-5,07 juta).

Usaha komunitas perempuan, LSM dan lembaga yang aktif dalam memberikan pemberdayaan kepada petani perempuan akan sia-sia jika secara institusional lembaga yang memiliki legitimasi bagi konstituen tidak meregulasi kebijakan pro petani perempuan. Peran negara sebagai ‘penjaga malam’ dalam pandangan neoliberalisme harus mampu ditentang oleh pemerintah Indonesia dengan mendukung gerakan *civil society* tersebut sembari terus memperbaiki sistem dan kebijakan yang sensitif gender dan berkeadilan. Terlebih dalam menghadapi globalisasi, negara tidak boleh begitu saja lepas tangan terhadap kemampuan dan kemajuan daya saing petani perempuan di Indonesia. Usaha-usaha konkret dalam peremajaan teknologi dan penyuluhan pertanian modern perlu menjadi agenda wajib agar tidak tertinggal dengan negara lain.

Maka kembali lagi ke idealisme relasi negara, *civil society* dan swasta dalam menghadapi globalisasi. Jika Indonesia tidak mau terjebak dalam proyek kelas kapitalis dalam bingkai globalisasi, maka negara harus menjadi garda terdepan untuk melindungi petani perempuan dari ketidakadilan gender agar mampu menjadi motor penggerak pertanian Indonesia melalui kebijakan yang sensitif gender, sedangkan LSM dan komunitas perempuan turut membantu pemerintah dalam usaha pemberdayaan perempuan. Demikianpun swasta, harus mampu mendorong masyarakat untuk lebih kompetitif dalam menghadapi globalisasi dengan menekan hasrat imperialismenya untuk menjadikan Indonesia tempat mengeruk keuntungan.

KESIMPULAN

Fenomena neoliberalisme yang melahirkan globalisasi membutuhkan solidaritas perempuan dengan melakukan kesadaran kelas terhadap petani perempuan mengenai posisinya di tengah arus globalisasi menjadi suatu kebutuhan penting untuk melindungi mereka dari kerentanan kemiskinan yang berasal dari efek globalisasi. Feminisasi pertanian yang terjadi akibat tuntutan kerja yang lebih tinggi dan sumber daya alam yang semakin terbatas, mampu menggerakkan LSM dan komunitas-komunitas yang peduli perempuan. Mereka secara vokal melakukan reposisi gerakan untuk menempatkan petani perempuan dalam hal yang strategis

sangat penting terutama dalam menekan negara, dalam hal ini pemerintah, untuk membuat regulasi yang sensitif gender.

Negara, yang dalam struktur neoliberalisme perannya dicitkan, harus menunjukkan keberpihakannya terhadap petani perempuan karena memiliki tanggung jawab sosial sesuai fungsi negara terhadap konstituennya untuk mendapatkan keadilan. Aktifnya LSM untuk mendukung gerakan kesejahteraan petani perempuan seharusnya bisa mendorong agar pemerintah mengupayakan keadilan akses dan kontrol untuk petani perempuan Indonesia yang sudah agak berjarak dengan perkembangan teknologi dan informasi di bidang pertanian. Solidaritas dan kesadaran kelas menjadi satu-satunya kekuatan terakhir bagi petani perempuan untuk dapat terus mengusahakan perjuangannya, terlebih karena struktur patriarkhi yang menjadi konsumsi di ranah publik membuat dilema pergerakan feminisme.